

KOORDINASI PENGELOLAAN DATA TERKAIT PENANGANAN COVID-19 OLEH BIDANG PERENCANAAN, DATA, KAJIAN DAN ANALISIS PADA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA BANDUNG

Mas Halimah¹; Imanudin Kudus²; Belinda Alifa³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹mashalimah50@gmail.com; ²imanudin.kudus@unpad.ac.id; ³belindaalifa75@gmail.com

ABSTRAK

Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis merupakan salah satu bidang pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang bertugas menangani pengelolaan data terkait penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, bidang ini berkoordinasi dalam pengumpulan data hingga analisis data. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses koordinasi yang dilakukan Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis Satgas Covid-19 Kota Bandung yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum efektifnya koordinasi yang dijalankan oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis.

Kata kunci: Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis; koordinasi; efektif.

COORDINATION OF DATA MANAGEMENT RELATED TO COVID-19 HANDLING BY THE FIELD OF PLANNING, DATA, STUDY AND ANALYSIS AT THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TASK UNIT, BANDUNG CITY

ABSTRACT

The field of Planning, Data, Study and Analysis is one of the fields in the Bandung City Covid-19 Handling Task Force which is in charge of handling data management related to the handling of Covid-19 in the City of Bandung. In its implementation, this field coordinates in data collection to data analysis. The author's purpose in conducting this research is to find out and analyze the coordination process carried out by the Planning, Data, Study and Analysis of the Bandung City Covid-19 Task Force which in its implementation has not been fully effective. The approach used in this research is a qualitative approach. The result of this research is the ineffectiveness of coordination carried out by the Planning, Data, Study and Analysis Division.

Keywords: *The field of Planning, Data, Study and Analysis; coordination; effective.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut Coronavirus Disease 2019 atau biasa disingkat dengan Covid-19 (Tuwu, 2020). Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus korona baru yang disebut SARS-Cov-2. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus virus Pneumonia di Wuhan, Republik Rakyat Cina (WHO, 2020). Salah satu kota besar di

Indonesia yang mempunyai angka persebaran Covid-19 yang cukup besar adalah Kota Bandung. Kota Bandung terletak di wilayah Jawa barat dan merupakan Ibukota Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan (jabarprov.go.id). Meskipun dunia sedang ramai dengan kasus mutasi virus baru yang bernama Omicron, Kota Bandung justru menjadi salah satu dari kota di Jawa Barat yang memiliki status tingkat Risiko Rendah dalam angka kenaikan Covid-19. Berdasarkan data yang disajikan di situs Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung menunjukkan bahwa angka kasus terkonfirmasi positif masih bertambah setiap

harinya, namun disertai dengan angka terkonfirmasi sembuh yang juga selalu naik setiap harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rantai virus Covid-19 masih belum terputus sehingga masih dibutuhkan penanganan optimal dari pemerintah Kota Bandung.

Berkaitan dengan bencana pandemi ini, semua jajaran pemerintahan berupaya untuk menangulangnya. Sejak awal pandemi, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dalam hal ini di Kota Bandung ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020. Dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020 Tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung. Dalam Keputusan Wali Kota tersebut juga dijelaskan susunan keanggotaan dan uraian tugas dari setiap bidang dan kelompok kerja. Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Keputusan Walikota No. 440/1256-Bag.Huk 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19, n.d.).

Salah satu hal yang krusial dalam penanganan Covid-19 adalah koordinasi dalam pengadaan seluruh data yang diperlukan. Kebutuhan akan data yang banyak serta pergerakan data yang sangat masif setiap harinya tentu membuat penanganan Covid-19 ini memerlukan satu bidang khusus yang fokus bertugas dalam mengidentifikasi kebutuhan data serta mengumpulkan data dan menganalisis guna pengambilan keputusan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung mengenai langkah penekan angka positif dan sebagai bahan acuan untuk membuat kebijakan-kebijakan oleh Komite Kebijakan. Langkah yang diambil untuk esok hari merupakan hasil dari analisis data dari hari sebelumnya. Terkait hal ini, Satgas Covid-19 Kota Bandung mempunyai Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis yang dikoordinatori oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota

Bandung. Adapun tugas Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis menurut Keputusan Walikota No. 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020 tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung yaitu, antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis;
2. Penyiapan bahan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019;
3. Pelaksanaan pengumpulan data, analisa, policy brief, protokol nasional, perencanaan, pelaporan percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019;
4. Menyusun kajian dan analisa berdasarkan data dan informasi berkenaan dengan penyebaran Coronavirus Disease 2019; dan
5. Penyiapan laporan pelaksanaan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.

Bappelitbang sebagai *leading sector* dalam perencanaan data mempunyai tugas yang kompleks. Berdasarkan hasil observasi penulis, unsur Dinas Kebakaran, Komando Distrik Militer, Kepolisian Resor, Pangkalan Angkatan Udara, Pangkalan Angkatan Laut, Detasemen Polisi Militer, dan Kejaksaan Negeri tidak memiliki tugas khusus yang dibakukan, misalnya dalam bentuk Surat Perintah. Bappelitbang berkoordinasi dengan unsur-unsur tersebut hanya dalam kondisi tertentu saja dan tidak ada pertemuan rutin yang dilakukan. Perencanaan Bidang Perencanaan, Kajian dan Analisis Data pun hanya Bappelitbang saja yang menentukan, tidak melibatkan anggota dari unsur lain dan tidak tertuang dalam satu kesepakatan yang baku. Hal ini kurang sesuai dengan uraian tugas pada Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research approach*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi atau memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis

dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai koordinasi dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan desain penelitian yang menonjolkan diri dan menunjukkan diri. Menunjukkan diri berarti memperkenalkan diri dan membuat dirinya terang dan jelas.

Teknik pengumpulan data dibentuk dalam dua bagian, yaitu:

Data primer, merupakan data yang penulis dapatkan langsung melalui wawancara dengan para informan

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh melalui penelitian terdahulu, peraturan perundang-perundangan, peraturan daerah, surat edaran menteri, surat keputusan wali kota serta dokumen-dokumen resmi lain yang mendukung penulis dalam penelitian yang berkaitan dengan koordinasi dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data yaitu melalui *observations, interviews, and documents*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Kerja dalam Koordinasi Pengelolaan Data Penanganan Covid-19 Di Kota Bandung

Penulis menemukan bahwa Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis telah menjalankan tugasnya sesuai yang tercantum di Keputusan Walikota. Bappelitbang sebagai instansi penanggung jawab dalam pengelolaan data penanganan Covid-19 berperan sebagai koordinator dan menjalankan fungsi koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, Bappelitbang telah berkomitmen menjadikan pengelolaan data terkait penanganan Covid-19 ini menjadi tugas Bappelitbang sebagai instansi penanggung jawab. Bappelitbang sebagai perencana data bertugas merumuskan varian data apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan laporan yang riil dan akurat. Bappelitbang melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait pengelolaan data dalam penanganan Covid-19. Bentuk koordinasi yang dilakukan Bappelitbang dengan instansi terkait salah satunya adalah meminta instansi tersebut mengumpulkan jenis data yang sudah dirumuskan oleh Bappelitbang dan kemudian meminta laporannya. Misalnya saja data terkait kegiatan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kota Bandung¹, data kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh aparat gabungan Satpol PP, TNI dan Polri², data kasus Covid-19 dari Dinas Kesehatan, dan lainnya Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung termasuk salah satu anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis yang mempunyai tugas sesuai dengan kewenangannya, yaitu penanggulangan bencana. Bentuk kegiatannya seperti penyemprotan disinfektan dan pembagian masker. Setelah melaksanakan setiap harinya Diskar PB akan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bappelitbang melalui grup Whatsapp. Kodim 0618 Bandung, Polrestabes Bandung, dan Detasemen Polisi Militer III/5 saling berkoordinasi dan berkerjasama dalam melaksanakan tugasnya dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis. Aparat gabungan ini melakukan giat kepatuhan yang kegiatannya yaitu patroli bersama untuk memberikan himbauan tentang protokol kesehatan kepada masyarakat, membubarkan kerumunan, memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Masing-masing instansi ini juga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi di wilayah teritorialnya masing-masing. Setiap harinya dibuat laporan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dan dikirim di *Whatsapp Group* instansi masing-masing yang nantinya akan diteruskan kepada Bappelitbang.

Arena Pertemuan

Forum pertemuan merupakan wadah yang menjadi tempat instansi yang terlibat dalam koordinasi untuk berdiskusi dan memecahkan masalah bersama supaya tercapai koordinasi yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Bappelitbang sebagai instansi penanggung jawab menyatakan bahwa di Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis sudah tidak ada rapat pertemuan rutin karena masing-masing yang terlibat sudah paham apa yang harus dilakukan. Anggota yang terlibat dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis terdiri dari berbagai instansi yang memiliki fokus pekerjaan berbeda-beda, sehingga tidak semua mengerti tentang pengelolaan data. Oleh karena itu, Bappelitbang sebagai instansi yang bergerak di perencanaan dan pengelolaan data dan juga sebagai koordinator bertugas mengarahkan anggotanya untuk menyukseskan pengelolaan data dalam penanganan Covid-19 di Bandung. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, instansi pendukung yang terlibat dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis tidak tahu

¹ Berdasarkan wawancara dengan informan 2, yaitu Kepala Seksi Mitigasi Bencana Diskar PB Kota Bandung.

² Berdasarkan wawancara dengan informan 3, 4, 5 dan 6, yaitu Kodim 0618, Polrestabes, Lanud Husein Sastranegara, dan Denpom III/5.

menahu tentang pengelolaan. Salah satu langkah penting dalam upaya menciptakan koordinasi yang baik adalah dengan diadakannya pertemuan rutin (Manullang, 2006, 78-79). Koordinasi yang baik didukung adanya tempat untuk forum pertemuan dimana instansi yang terlibat dapat membentuk aturan dalam pengambilan keputusan, saling menyesuaikan, berbagi informasi, mendiskusikan kebijakan dan membuat keputusan (Lie, 2010). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, semua informan menyatakan bahwa rapat yang diselenggarakan yaitu Rapat Terbatas dan Rapat Evaluasi yang merupakan rapat seluruh anggota Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung. Rapat Terbatas dilaksanakan setiap minggu pada saat kasus Covid-19 sedang berada di puncak. Untuk kondisi saat ini dimana PPKM Level 1 sudah diberlakukan di Kota Bandung, Rapat Terbatas dilakukan setiap sebulan sekali. Sebelum pelaksanaan Rapat Terbatas, diadakan rapat untuk mengevaluasi hal-hal yang sebelumnya sudah diputuskan dan membahas paparan yang akan dipaparkan dalam Rapat Terbatas. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh seluruh anggota Satgas Covid-19 Kota Bandung, sedangkan Rapat Terbatas dihadiri oleh pimpinan-pimpinan daerah dan Forkopimda beserta wakil-wakilnya yang mendampingi untuk membahas kebijakan apa yang akan dilakukan untuk beberapa waktu ke depan. Forum-forum pertemuan ini selalu diadakan secara virtual melalui platform *Zoom Meeting*. Tidak terdapat rapat internal Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis yang dilakukan secara rutin. Rapat internal hanya dilakukan di awal pandemi untuk merumuskan jenis data yang harus dicari dan bentuk pelaporan data. Selanjutnya, ketika jenis data dan bentuk pelaporan data sudah ditentukan, semua anggota bekerja masing-masing sesuai tugasnya. Rapat internal ini merupakan rapat yang dilakukan oleh internal Bappelitbang, tidak dengan keseluruhan Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis.

Tujuan Bersama

Koordinasi dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam pengelolaan data oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis tentu harus memiliki tujuan yang jelas karena tujuan menjadi dasar penggerak koordinasi berjalan. Tujuan bersama berarti tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dengan seluruh anggota, dalam hal ini seluruh anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, serta diketahui dan disepakati bersama baik secara formal maupun informal. Koordinasi yang efektif menekankan pada adanya tujuan yang jelas dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat (Bose, 2012). Jika tidak ada tujuan dan pembagian kerja yang jelas, maka instansi-instansi akan bekerja menuju tujuan yang berbeda dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga koordinasi pengelolaan data terkait penanganan

Covid-19 di Kota Bandung tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan juga berperan sebagai pengikat dan penggerak kesadaran komitmen setiap instansi yang terlibat. Dengan mengetahui dan memahami tujuan yang akan dicapai bersama, maka akan menciptakan kesadaran kerja yang harmoni dan koordinasi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari seluruh informan, koordinasi pengelolaan data di Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung tidak terdapat dokumen atau pedoman khusus yang disepakati bersama karena wabah Covid-19 ini bencana yang datang tiba-tiba dan kasusnya bergerak dinamis, sehingga yang diperlukan bukanlah perencanaan melainkan strategi. Sampai saat ini, koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, khususnya Bappelitbang sebagai koordinator masih mengacu pada Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung. Namun, di dalam surat keputusan tersebut tidak dijelaskan seperti apa detail keterlibatan Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Unsur Komando Distrik Militer 0618 Bandung, Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Unsur Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung, Unsur Komandan Angkatan Laut Kota Bandung, Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung, dan Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam pengelolaan data sehingga instansi-instansi tersebut hanya fokus pada tugas masing-masing. Semua bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu percepatan penanganan Covid-19, namun tidak semua menyadari perannya yang juga sebagai anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis. Belum adanya peraturan khusus atau pedoman bersama untuk pengelolaan data ini menandakan bahwa koordinasi pengelolaan data pada Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis masih bersifat sektoral.

Koordinasi dalam pengelolaan data oleh Bappelitbang tetap dilakukan meskipun belum ada pedoman khusus yang tertulis dan disepakati bersama dengan instansi-instansi yang terlibat. Alih-alih Bappelitbang berinisiatif untuk membentuk Tim Pengelola Data sendiri yang dibakukan dalam Surat Perintah Kepala Bappelitbang Kota Bandung. Belum adanya pedoman bersama yang mendefinisikan sasaran dan tujuan yang jelas terkait pengelolaan data dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandung tidak lantas menjadi alasan bahwa koordinasi antara Bappelitbang dan instansi-instansi terkait tidak berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, Bappelitbang dan instansi-instansi yang terlibat tetap berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan sepakat bahwa dalam pengelolaan data dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandung, instansi-instansi yang terlibat mengacu pada tugas

dan fungsi masing-masing, dan melaksanakan mitigasi bencana banjir sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Kepemimpinan

Komitmen pemimpin dari instansi-instansi yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan data merupakan hal yang sangat penting. Pemimpin yang aktif dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadi pendukung dalam keberhasilan koordinasi. Koordinasi yang melibatkan banyak organisasi membutuhkan seorang pemimpin karena prosesnya yang kompleks dan juga membutuhkan pengambilan keputusan. Komitmen dalam koordinasi pengelolaan data pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung dapat terlihat dari diprioritaskannya pengelolaan data oleh instansi penanggung jawab, yakni Bappelitbang sebagai koordinator. Juga oleh instansi-instansi terkait lainnya dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dengan terlibat aktif dalam setiap kegiatan penanganan Covid-19 dan pelaporan kegiatannya setiap hari kepada Bappelitbang dan pimpinannya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, Bappelitbang telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan koordinasi terkait pengelolaan data dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandung dengan instansi-instansi terkait sesuai dengan yang ditetapkan pada Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang meliputi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Unsur Komando Distrik Militer 0618 Bandung, Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Unsur Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung, Unsur Komandan Angkatan Laut Kota Bandung, Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung, dan Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, Bappelitbang telah berkomitmen menjadikan kegiatan pengelolaan data sebagai salah satu prioritas dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Komitmen ini dapat dilihat dari laporan harian yang konsisten selalu dibuat dan selalu ada setiap harinya. Dalam pembuatan laporan harian ini melalui proses yang tidak sebentar sebelum akhirnya menemukan format yang pasti dan dipakai dalam jangka panjang. Pemimpin, dalam hal ini Kepala Bappelitbang Kota Bandung berkomitmen dari awal dibentuknya Satgas Covid-19 di Kota Bandung dengan melakukan perumusan varian data apa saja yang dibutuhkan untuk dilaporkan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. Kepala Bappelitbang juga menurunkan mandat pekerjaan kepada bawahannya dengan membentuk Tim Pengelola Data Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang keanggotaannya dievaluasi setiap tahun serta ditetapkan di dalam Surat perintah.

Sejauh ini, instansi-instansi yang terlibat dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis tetap berkomitmen dalam penanganan Covid-19 dan pengelolaan data dengan mengerahkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk membantu Bappelitbang dalam melaksanakan pengelolaan data. Tanpa adanya personel dari instansi lain yang menjalankan program kegiatannya maka tidak akan ada data yang dihasilkan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berbeda berkesinambungan untuk menurunkan angka kasus Covid-19 di Kota Bandung. Namun, pada dasarnya koordinasi yang melibatkan banyak organisasi di dalamnya membutuhkan sosok pemimpin yang fokus pada diskusi dan mencari solusi yang tepat dibandingkan hanya memberi instruksi formal (Lie, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, pemimpin koordinasi pada pengelolaan data di Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis sudah menjalankan kewajibannya dengan terlibat aktif dan ikut berdiskusi serta mencari solusi, hal ini terlihat dari perumusan jenis varian data yang penentuannya dibantu oleh Kepala Bappelitbang. Namun hal ini hanya dominan dilakukan di dalam internal Bappelitbang saja, belum menyeluruh pada internal Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis.

Kepercayaan dan Sikap Positif

Koordinasi dalam pengelolaan data oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis melibatkan berbagai instansi yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Instansi-instansi yang tercantum sebagai anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis memiliki karakteristik berbeda serta tugas pokok dan fungsi tersendiri. Karakteristik dan latar belakang yang berbeda menciptakan budaya kerja yang berbeda, yang tidak tentu ketika disatukan dengan organisasi lain yang berbeda budaya kerjanya dapat menghasilkan kerjasama yang baik. Maka dari itu, koordinasi dilakukan untuk menyatukan sejumlah keahlian dan perhatian yang saling bertolak belakang untuk ke arah tujuan bersama (Mc Farland, 1959). Oleh karenanya, masing-masing instansi harus memahami bahwa pengelolaan data ini adalah tanggung jawab bersama sebagai sesama anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis.

Koordinasi memerlukan kerjasama yang baik antar instansi yang terlibat yang didukung dengan sikap yang saling terbuka dan mengedepankan kepentingan bersama. Salah satu langkah esensial dalam mengupayakan koordinasi yang efektif yaitu dengan adanya kerjasama antar pihak yang terlibat untuk saling mengisi, membantu, dan saling melengkapi satu sama lain supaya tercapainya tujuan yang ditargetkan (Bose, 2012). Untuk mencapai kerjasama yang baik instansi yang terlibat harus memahami perannya satu sama lain supaya tidak berjalan

sendiri-sendiri, karena dalam koordinasi pengelolaan data terkait penanganan Covid-19 di Kota Bandung ini Bappelitbang berperan sebagai koordinator yang tugasnya adalah mengarahkan instansi-instansi yang terlibat dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan data. Instansi-instansi yang berada di bawah koordinasi Bappelitbang harus menjalankan arahan tersebut supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk itu, dibutuhkan kepercayaan di kalangan instansi yang terlibat untuk saling percaya bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing instansi adalah kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan. Rasa percaya dan sikap positif seringkali membuat seseorang akan lebih berdedikasi terhadap tugasnya, sehingga proses koordinasi menjadi efektif (Lie, 2010). Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat dokumen kerjasama khusus dalam koordinasi Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis karena sudah diatur di dalam Keputusan Walikota tentang pembentukan Satgas Covid-19 Kota Bandung sehingga tidak terdapat standar operasional yang bersifat lebih teknis untuk seluruh anggota bidang. Masing-masing instansi bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya saja sehingga kerjasama yang terjadi hanya secara kondisional apabila terdapat instansi yang saling membutuhkan. Bappelitbang sebagai instansi koordinator menegaskan bahwa instansi-instansi yang terlibat sebagai anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis merupakan pihak yang berhak meminta data kepada instansi yang diminta. Hal ini diketahui bersama tanpa adanya pembagian kerja yang jelas untuk instansi anggota lain selain Bappelitbang. Pekerjaan di dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis merupakan pekerjaan yang spesifik sehingga memang dibutuhkan orang dengan keahlian khusus untuk mengerjakannya. Maka dari itu, pelaksanaan pengelolaan data dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandung ini didominasi oleh Bappelitbang. Meskipun begitu, instansi lain pun tidak menutup diri dalam kerjasama terkait pengelolaan data.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, instansi-instansi yang terlibat menyatakan sudah melakukan kerjasama yang baik. Hal ini dapat dilihat dari antusias dan responsifnya antar instansi bila diminta bantuan tertentu. Sejauh ini, Bappelitbang merupakan instansi yang berperan sebagai pengumpul data dari instansi-instansi lain. Bappelitbang bekerjasama dengan aparat gabungan TNI dan Polri yang juga sebagai anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis untuk mengumpulkan data lapangan terkait kepatuhan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan. Diskar PB Kota Bandung yang merupakan instansi dengan tugas pokok menanggulangi kebencanaan juga

melakukan pengumpulan data berupa kegiatan penyemprotan desinfektan, pembagian masker dan kegiatan harian lainnya yang dilaporkan kepada Bappelitbang. Beberapa instansi seperti Unsur Komando Distrik Militer 0618 Bandung, Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, dan Unsur Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung juga menjadi pengumpul data vaksinasi karena mengadakan layanan vaksinasi di instansinya masing-masing.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin antar instansi sudah terlaksana dengan baik, dan sudah dilakukan beberapa upaya dari Bappelitbang sebagai instansi koordinator untuk membangun kedekatan dan komunikasi dengan instansi lainnya yang terlibat dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis melalui sarana virtual. Adanya sarana virtual sangat mendukung proses koordinasi pengelolaan data dilakukan secara efektif dan efisien.

Jarak Geografis/Jumlah Organisasi yang Terlibat dan Penggunaan Teknologi Informasi

Koordinasi dapat berjalan dengan efektif ketika jumlah partisipannya sedikit dan dipisahkan dengan jarak geografis yang dekat serta mempunyai sistem teknologi informasi yang mendukung (Lie, 2010). Berkaitan dengan penjelasan tersebut, penulis menemukan bahwa Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis terdiri dari instansi-instansi yang berada di Kota Bandung dengan luas 167,3 km². Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung dibentuk sesuai dengan perintah dari pusat dan merupakan turunan dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Penanganan Covid-19 dilakukan sampai level terkecil pemerintahan supaya penanggulangannya menyeluruh dan tuntas. Salah satu tujuan dibuat Satgas Penanganan Covid-19 di setiap daerah adalah supaya pengawasan dan penanggulangan dilakukan di setiap scoop daerah dan memudahkan cakupan koordinasi.

Namun, koordinasi juga mudah dilakukan jika struktur organisasi dan birokrasinya ramping. Struktur organisasi yang ramping memudahkan dalam berkoordinasi sebab rentang kendalanya kecil. Namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi struktur organisasi Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Struktur Organisasi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung melibatkan seluruh elemen mulai dari

Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta DPRD Kota Bandung. Pelibatan seluruh unsur tersebut merupakan instruksi dari pusat dan juga merupakan bentuk wujud bahwa penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada di Kota Bandung.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, pelibatan banyak instansi yang bukan ahli di bidang pengelolaan data ini menyebabkan kesenjangan beban pekerjaan antara instansi koordinator dengan instansi lainnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis juga, hampir seluruh pekerjaan pengelolaan data dilakukan hanya oleh Bappelitbang. Mulai dari perencanaan dan perumusan, penyiapan bahan, pengumpulan data, menyusun kajian dan analisa, hingga penyusunan laporan dilakukan oleh Tim Pengelola Data yang khusus dibentuk oleh Kepala Bappelitbang. Sedangkan instansi lain yang terlibat dalam Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis hanya berperan sebagai penyedia data dan bahkan hanya sebagai konsumen data. Hal ini disebabkan karena tugas pokok dan fungsi yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Juga kurang dilibatkannya seluruh instansi dari awal perumusan dan perencanaan serta tidak adanya pertemuan rutin yang dapat memberi edukasi kepada instansi anggota terkait bagaimana jalannya pengelolaan data. Instansi lain hanya menerima laporan jadi yang dibuat Bappelitbang sehingga pengetahuan instansi lain tentang pengelolaan data sangat minim. Hal ini juga menyebabkan kurangnya kesadaran masing-masing instansi akan perannya di Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, karena tidak memiliki tugas khusus di bidang tersebut. Hasil dari wawancara penulis menyebutkan bahwa dalam pengerjaan pengelolaan data lebih baik dikerjakan dengan anggota yang sedikit sehingga rentang kendalinya pendek. Rentang kendali yang pendek mempercepat birokrasi sehingga pekerjaan cepat selesai. Hal ini yang melatarbelakangi dibentuknya Tim Pengelola Data Evaluasi Pelaksanaan PSBB/PPKM di Bappelitbang karena output yang dituntut adalah laporan harian dan berhadapan dengan data yang sifatnya dinamis serta fluktuatif. Di sisi lain, instansi lain yang terlibat sebagai anggota juga mempunyai tugas pokok dan program sendiri dalam penanganan Covid-19 sehingga Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis terkesan bekerja sendiri-sendiri. Meskipun begitu, semua tetap berkomitmen untuk saling membantu jika dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pengelolaan data melibatkan banyak organisasi dengan latar belakang dan tugas pokok serta fungsi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan

ketidakefektifan dalam pembagian beban kerja, karena terlalu banyak keahlian di berbagai bidang, tidak hanya terfokus pada bidang pengelolaan data. Namun, di sisi lain dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi saat ini dapat mengurangi hambatan berkoordinasi dimana koordinasi dapat dilakukan melalui platform sosial media dan memanfaatkan website serta aplikasi yang berguna bagi proses pengumpulan data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pengelolaan data oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis sangat memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi. Penggunaan internet menjadi hal penting dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan data. Dengan adanya internet, semua instansi dapat terhubung tanpa batas jarak dan waktu. Pada pelaksanaannya, komunikasi dalam koordinasi secara umum sudah dilakukan melalui Whatsapp Group. Tidak hanya sebagai sarana komunikasi, Whatsapp Group juga menjadi sarana berbagi file data dan laporan-laporan terkait kegiatan penanganan Covid-19 di setiap instansi. Penggunaan platform sosial media lainnya juga memudahkan koordinasi seperti penggunaan Instagram sebagai sarana penyebaran info dari pemerintah daerah kepada masyarakat tanpa harus menimbulkan kerumunan massa. Selain itu, kondisi yang serba virtual dan dilarangnya perkumpulan massa menyebabkan tidak dapat diselenggarakannya pertemuan secara tatap muka sehingga rapat pertemuan selalu diadakan secara online. Rapat virtual ini memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting yang dapat memadai banyak partisipan untuk berkumpul dan berdiskusi dengan jarak yang berjauhan.

Pada pelaksanaan teknis pengumpulan data, Bappelitbang sebagai leading sector dan perumus jenis data yang diperlukan memanfaatkan sarana Google Form sebagai wadah bagi instansi terkait untuk mengumpulkan data harian. Bappelitbang juga mendirikan sebuah aplikasi bernama E-Mantul yang berfungsi sebagai platform pelaporan data kepatuhan dari petugas lapangan jajaran Satpol PP, TNI dan Polri. Selain itu, pelaporan data juga ada yang dilakukan melalui whatsapp group dalam bentuk teks.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, semua informan sepakat bahwa adanya internet dan sosial media sebagai sarana koordinasi yang efektif karena semua dapat dilakukan serba cepat dan life time. Mengingat penanggulangan wabah Covid-19 ini harus dilakukan dalam ritme kerja yang cepat, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Dengan adanya sarana pertemuan virtual menjadikan pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan secara efektif disertai dengan diskusi

bersama seluruh perangkat daerah yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, diperoleh poin kesimpulan bahwa koordinasi dalam pengelolaan data terkait penanganan Covid-19 oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena belum memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam dimensi pembagian kerja, arena pertemuan, tujuan bersama, kepemimpinan, kepercayaan dan sikap positif, serta jarak geografis/jumlah organisasi yang terlibat dan penggunaan teknologi dan informasi. Terdapat beberapa poin yang menjadi kendala dan menghambat koordinasi dalam pengelolaan data terkait penanganan Covid-19 di Kota Bandung.

Pertama, belum adanya pembagian tugas yang spesifik kepada setiap anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis sehingga setiap instansi bekerja hanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini terlihat dari instansi anggota yang tidak tahu menahu tentang tugas pokok pengelolaan data. Masing-masing instansi anggota juga tidak dapat menyebutkan perwakilan yang berkoordinasi dengan pihak Bappelitbang dan jarang dilakukannya koordinasi dengan Bappelitbang karena masing-masing instansi fokus pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

Kedua, kondisi wabah Covid-19 yang fluktuatif menjadi faktor dari tidak adanya pertemuan rutin dengan internal Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis. Rapat pertemuan dilakukan secara kondisional. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan instansi lain terkait bagaimana proses pengelolaan data.

Ketiga, tujuan dari adanya pengelolaan data belum terdefiniskan secara jelas. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pedoman bersama yang disepakati oleh keseluruhan anggota Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis sehingga semua bekerja masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini menyebabkan pemahaman instansi-instansi yang terlibat terkait tujuan dan ukuran keberhasilan koordinasi berbeda-beda. Keempat, Pemimpin menjalankan kewajibannya dengan melaksanakan fungsi koordinasi dan terlibat aktif dalam diskusi dan mencari solusi, namun hanya dilakukan di dalam internal Bappelitbang, tidak secara menyeluruh pada internal Bidang Perencanaan,

Data, Kajian dan Analisis. Hal ini menyebabkan kurangnya sharing knowledge antara Bappelitbang dengan instansi anggota mengenai proses pengelolaan data.

Kelima, kerjasama yang terjalin antar instansi di Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis sudah terlaksana dengan baik. Bappelitbang selaku instansi koordinator berupaya membangun kedekatan dan komunikasi secara cair melalui Whatsapp Group. Rasa percaya dan sikap positif menciptakan suasana instansi yang saling mendukung, namun dukungan yang diberikan belum terintegrasi ke dalam pengelolaan data.

Keenam, melibatkan banyak organisasi dengan latar belakang dan tugas pokok serta fungsi yang berbeda-beda menimbulkan kesenjangan dalam pembagian beban kerja, karena beban kerja akan banyak dilimpahkan kepada instansi yang ahli di bidang pengelolaan data saja. Namun, di sisi lain memberi mandat kepada banyak organisasi dapat menjadi pengikat moral dan tanggung jawab seluruh elemen pemerintahan akan penanganan Covid-19. Juga dengan adanya pemanfaatan teknologi dan informasi dapat mengurangi hambatan koordinasi, dimana koordinasi dipermudah dengan melakukannya melalui platform sosial media dan memanfaatkan website serta aplikasi buatan yang berguna bagi proses pengumpulan data.

Bappelitbang memiliki peran yang esensial dalam koordinasi pengelolaan data di Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis. Bappelitbang memiliki fungsi koordinasi, yaitu membawahi dan melakukan pengarahan terhadap instansi-instansi yang menjadi anggotanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Namun, berdasarkan proses analisis data yang telah dilakukan dengan mengacu pada teori yang dijabarkan oleh Amund Lie, Penulis memberikan simpulan bahwa Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis belum menjalankan fungsi koordinasi dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bose, D. C. (2012). *Principles of Management and Administration*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
- Creswell, J. . (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handyaningrat. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Koontz, H., & O'Donnel. (1968). *Principles of Management*. New York: Mc Graw Hill Book Company.

- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada UniPress.
- Mintzberg, H. (1983). *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Pfiffner, J. M. (1960). *Public Administration*. New York: Ronald Press.
- Rosenbloom, D. (1989). *Public Administration Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. New York: McGraw Hill Humanities.
- Sugandha, D. (1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- White, L. D. (1958). *Introduction to The Study of Public Administration*. New York: Macmillan.
- Hening, Andini. (2016). *Koordinasi dalam Penanganan Gelandangan Psikotik Kota Bandung*. Universitas Padjadjaran.
- Maulana, Dimas. (2017). *Koordinasi dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. Universitas Padjadjaran.
- S. Zakiyah, Willya. (2021). *Koordinasi dalam Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung*. Universitas Padjadjaran.
- Wibisono, Gunawan. (2019). *Koordinasi Penyelenggaraan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung Barat*. Universitas Padjadjaran.
- Achyar, E., Schmidt-Vogt, D., & Shivakoti, G. P. (2015). *Dynamics of The Multi Stakeholder Forum and Its Effectiveness in Promoting Sustainable Forest Fire Management Practices in South Sumatra, Indonesia*. *Environmental Development*, 13, 4-17.
- Fadlurrahman, & Vira. (2020). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial I* Vol. 11: 171-183.
- Hartono, Adi. (2016). *Koordinasi Antar Lembaga Dan Stakeholder Dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Studi Kasus: Taman Flora Dan Taman Ekpresi Di Kota Surabaya)*. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*. ISSN 2303 - 341X 4(3):1-12. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Lie, Amund, 2010. *Coordination Processes and Outcomes in Norway and New Zealand: The Challenge of Inter-Organizational Coordination of Food Safety Issues*. University of Oslo. Faculty of Social Science.
- Malone, T. W., & Crowstone. (1994). *The Interdisciplinary Study of Coordination*. *ACM Computing Surveys*, 26.
- New Zealand Office of the Controller and Auditor General. (2003). *Key Success Factors for Effective Coordination and Collaboration between Public Sector Agencies*. New Zealand Report: Report of the Controller and Auditor General.
- Ramdhani, R., Nurasa, H., & Utami, S. B. (2018). *Koordinasi Penerapan Kebijakan Aerotropolis di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 15(2), 227-241.
- State Service Commission. (2008). *Factors for Successful Coordination-A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively*. New Zealand: State Service Commission.
- Tuwu, Darmin. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. *Journal Publicuho* 3(2):267.
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. (2020). *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(3):247-60.
- Keputusan Walikota No. 440/1256-Bag.Huk 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (n.d.).
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (1985). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, (1), 1-5. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2Fdocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>